

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI IGD RSUD I LAGALIGO WOTU

Desak Nyoman Suartini¹⁾, Andi Syamsul Bachru Jamal²⁾, Anas Budi³⁾*

^{1,2,3}Jurusan Keperawatan, STIKes Bataraguru, Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur

Email: anasbudi46@yahoo.com

Diterima: November 2020, Diterbitkan: Desember 2020

ABSTRAK

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit merupakan suatu ketentuan-ketentuan bagi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka usaha pemerintah untuk menjamin kualitas pelayanan rumah sakit. Standar Pelayanan Minimal ini dapat digunakan sebagai pedoman kualitas pelayanan bagi setiap rumah sakit di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dengan implementasi standar pelayanan minimal di IGD RSUD I Lagaligo Wotu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional, dimana seluruh variabel yang diamati diukur secara bersamaan ketika penelitian berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di IGD RSUD I Lagaligo Wotu. Pemilihan sampel dengan teknik total sampling. Subyek penelitian adalah 33 perawat di IGD RSUD I Lagaligo Wotu. Hasil analisis bivariat menggunakan Uji Chi-Square, menunjukkan bahwa ada hubungan antara sarana prasarana dengan implementasi standar pelayanan minimal dengan nilai $p=0,008$, serta terdapat hubungan antara sumber daya manusia dengan implementasi standar pelayanan minimal dengan nilai $p=0,000$.

Kata Kunci: Sarana Prasarana, SDM, SPM

ABSTRACT

Hospital Minimum Service Standards (SPM) are provisions for hospitals issued by the Minister of Health of the Republic of Indonesia in the context of government efforts to ensure the quality of hospital services. This Minimum Service Standard can be used as a guideline for the quality of service for every hospital in Indonesia. This research aimed to study the infrastructure and human resources with implementation of minimum service standards in the Emergency Department (IGD) Regional General Hospital (RSUD) I Lagaligo, East Luwu. The research used in this research is quantitative with a cross-sectional approach, in which all observed variables are measured simultaneously when the research is taking place. This research was conducted in the Emergency Room Installation Room (IGD) Regional General Hospital (RSUD) I Lagaligo East Luwu. Sample selection with total sampling technique. The research subjects were 33 nurses in the IGD Lagaligo Wotu East Luwu Regional Hospital. The results showed that the results of the bivariate analysis used the Chi-Square Test. It shows that there is a relationship between infrastructure with implementation of minimum service standards with a value of $p = 0.008$, and there is a relationship between human resources with implementation of minimum service standards with a value of $p = 0.000$.

Keywords: Infrastructure, HR, SPM

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia oleh karena itu, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dengan melakukan upaya kesehatan yang terpadu menyeluruh dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Agustina, 2016).

Kebijakan pemerintah perihal standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Indonesia diatur dalam Permenkes No 741/Menkes/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota. penerapan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas/ Rumah Sakit (Bangsawan et al., 2016).

Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan meliputi pelayanan promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, sehingga dalam menjalankan fungsinya rumah sakit harus memiliki standar pelayanan (Juanita et al., 2018)

Peraturan Pemerintah no 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (pasal 1 angka 6) menyatakan bahwa "Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal". Seperti standar pelayanan minimal di IGD yaitu Keberhasilan resusitasi pasien Gawat Darurat Fisik, Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam, Pemberian pelayanan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS/BTCLS, Time respon pelayanan dokter di IGD, Kepuasan pelanggan IGD, Kematian pasien di IGD, dan sarana prasarana ruang tunggu, administrasi, triase, sistem informasi, resusitasi, ruang tindakan dll. Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan". SPM merupakan kebutuhan

dasar warga negara, yakni kebutuhan fisiologis yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan warga negara hidup tidak layak atau bahkan bisa meninggal secara sia-sia. (Hendarwanl & Oster, 2015).

Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit memiliki peran utama dalam penanggulangan gawat darurat untuk melakukan triase, resusitasi dan stabilisasi (Astuti et al., 2017).

Rumah Sakit di Indonesia terdiri dari rumah sakit publik dan rumah sakit privat dengan jumlah total 2,773. Pertumbuhan RS publik selama 6 tahun terakhir tidak sepesat pertumbuhan RS privat. Rata-rata pertumbuhan RS publik sebesar 0.4%, karena adanya penurunan jumlah RS Swasta non profit, sedangkan RS privat sebesar 15.3% (Trisnantoro, 2018).

Jumlah RS swasta dibandingkan RS pemerintah lebih banyak, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7%. Sedangkan pertumbuhan RS pemerintah hanya sebesar 3%. Berdasarkan kepemilikan, pertumbuhan RS swasta profit lebih agresif dibandingkan jenis RS lainnya. Rata-rata pertumbuhan sebesar 17.3%. RS publik milik Pemprov hanya sebesar 7.7%, dan RS lain pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Hal yang perlu diperhatikan adalah penurunan jumlah RS swasta non profit yang cukup signifikan di akhir tahun 2017 (Trisnantoro, 2018).

Upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit mengacu kepada Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2012. Yang menjadi indikator di IGD adalah kemampuan menangani life saving anak dan dewasa, jam buka pelayanan gawat darurat, pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku TLS/ACLS/BCTLS/PPGD, ketersediaan tim penanggulangan bencana, waktu tanggap pelayanan dokter di IGD.

Berdasarkan pendahuluan diatas maka peneliti tertarik melaksanakan suatu penelitian terkait analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal di IGD RSUD I Lagaligo Luwu Timur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional* mengenai Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penelitian ini dilakukan di IGD RSUD I Lagaligo Wotu tahun 2020 dengan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik *total sampling* yaitu 33 perawat. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner diantaranya kemampuan menangani life saving, pemberi pelayanan bersertifikat, ketersediaan tim Penanganan bencana, jam buka pelayanan, waktu tanggap pelayanan, tidak adanya keharusan membayar uang muka, Kematian pasien, kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat. Kuesioner adalah alat ukur kemampuan sosialisasi yang berupa lembar pertanyaan yang berpedomankan pada pengkajian sosial (Sugiono, 2017). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data Primer. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data, langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari dan data berupa lembar kuesioner. Analisis univariat untuk mengetahui gambaran dari subjek penelitian dan analisis bivariat untuk mengetahui Hubungan antara sarana prasarana dan sumber daya manusia sebagai variabel independen dengan implementasi standar pelayanan minimal sebagai variabel dependen dengan menggunakan uji *Chi-square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel pada penelitian ini terdiri atas tiga jenis, Variabel independen yaitu Sarana prasarana, dan sumber daya manusia, sedangkan variabel dependen yaitu *standar pelayanan minimal*.

Hasil penelitian dapat diketahui distribusi responden berdasarkan sarana prasarana dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan sarana prasarana di IGD RSUD Ilagaligo Wotu

Sarana Prasarana	Jumlah	%
Sesuai	26	78.8
Kurang sesuai	7	21.2
Total	33	100

Sumber: data primer 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden memiliki sarana prasarana yang sesuai yaitu sebanyak 26 (78,8%). Dan yang sarana prasarana tidak sesuai sebanyak 7 (21,2%). Hal ini menunjukkan bahwa di instalasai gawat darurat RSUD I Lagaligo Wotu sangat memadai.

Adapun hasil penelitian dapat diketahui distribusi responden berdasarkan Sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan SDM di IGD RSUD I lagaligo Wotu

SDM	Jumlah	%
Sesuai	24	72.7
Kurang sesuai	9	27.3
Total	33	100

Sumber: data primer 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa Sumber daya manusia di IGD yang sesuai yaitu sebanyak 24 orang (72.7%). Sedangkan yang kurang sesuai sebanyak 9 orang (27,3%). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di IGD RSUD I Lagaligo Wotu mempunyai kualitas yang baik.

Adapun hasil penelitian dapat diketahui distribusi responden berdasarkan implementasi standar pelayanan minimal dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan Implemetasi Standar Pelayanan Minimal di IGD RSUD I lagaligo Wotu

SPM	Jumlah	%
Sesuai	23	69.7
Kurang sesuai	10	30.3
Total	33	100

Sumber: data primer 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa Standar pelayanan minimal di IGD yang sesuai yaitu sebanyak 23 orang (69,7%). Sedangkan yang kurang sesuai sebanyak 10 orang (30,3%). Hal ini menunjukkan bahwa Standar pelayanan minimal di instalasai gawat darurat RSUD I Lagaligo Wotu sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku.

Hubungan antara sarana prasarana dengan standar pelayanan minimal di instalasi gawat darurat RSUD I Lagaligo Wotu Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan melalui tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Hubungan antara sarana prasarana dengan Standar Pelayanan Minimal di IGD RSUD I lagaligo Wotu

Sarana Prasarana	Standar Pelayanan Minimal				p value
	Kurang Sesuai		Sesuai		
	N	%	N	%	
Kurang Sesuai	5	71.4%	2	28.6%	0,008
Sesuai	5	19.2%	21	80.8%	
Total	10		23		

Berdasarkan hasil analisis *chi square* menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara Sarana prasarana dengan standar pelayanan minimal di ruang instalasi gawat darurat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki

sarana prasarana yang sesuai yaitu sebanyak 26 (78,8%). Dan yang sarana prasarana tidak sesuai sebanyak 7 (21,2%). Hal ini menunjukkan bahwa adanya sarana prasarana yang bisa di manfaatkan langsung oleh tenaga kesehatan untuk kepentingan pasien baik itu berupa alat, bahan, ruang yang nyaman dan lain lain. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di IGD sudah memenuhi standar yang ada. Namun Pada segi fisik perlu perbaikan tata ruangnya dan segi alat kesehatan masih ada yang tidak ada, untuk alat kesehatan yang sudah ada perlu penambahan jumlah alat lagi.

Hasil analisis *chi-square* menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara sarana prasarana dengan standar pelayanan minimal di ruang Instalasi gawat darurat. Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap informan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan IGD RSUD I Lagaligo Wotu sudah memenuhi standar pelayanan, prasarana meliputi kelengkapan-kelengkapan peralatan medis sebagai penunjang pelayanan di IGD juga sudah dipenuhi rumah sakit, sebagaimana sesuai dengan hasil checklist standar sarana dan prasarana berdasarkan Kepmenkes nomor 856 tahun 2009. Selain faktor petugas kesehatan faktor lainnya juga yang berperan adalah ketersediaan sarana penunjang. Gedung IGD sudah di bangun lebih luas, bersih dan nyaman, WC kamar mandi bersih. Hal ini di karenakan adanya pimpinan di rumah sakit tersebut sangat peduli terhadap pembangunan sarana prasarana untuk memberikan kenyamanan kepada petugas kesehatan dan pasien.

Hal ini tidak sejalan dengan Astuti et al (2017) menyatakan beberapa masalah yang datang dalam pelaksanaan SPM di IGD adalah kurangnya sarana dan prasarana karena pengajuan perbaikan atau permintaan sarana dan prasarana terkendala oleh birokrasi yang rumit, serta pasifnya feedback yang diberikan oleh direktur dan manajemen dalam

menanggapi evaluasi dari unit pelayanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto et al., (2014) di rumah sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri menyatakan bahwa infrastruktur yang tersedia belum maksimal.

Hubungan antara sumber daya manusia dengan standar pelayanan minimal di ruang instalasi gawat darurat RSUD I Lagaligo Wotu Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan melalui tabel 5 berikut:

Tabel 5. Distribusi Hubungan antara Sumber Daya Manusia dengan Standar Pelayanan Minimal di IGD RSUD Ilagaligo Wotu

SDM	Standar Pelayanan Minimal				Q value
	Kurang Sesuai		Sesuai		0,000
	N	%	N	%	
Kurang Sesuai	7	77.8%	2	22.2%	
Sesuai	3	12.5%	21	87.5%	
Total	10		23		33

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara sumber daya manusia dan *standar pelayanan minimal* di ruang instalasi gawat darurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia di IGD yang sesuai yaitu sebanyak 24 orang (72.7%). Sedangkan yang kurang sesuai sebanyak 9 orang (27,3%). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di instalasi gawat darurat RSUD I Lagaligo Wotu mempunyai kualitas yang baik.

Tenaga kesehatan/ medis merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan pada pasal 1 bahwa tenaga kesehatan/ medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Instalasi Gawat Darurat RSUD Ilagaligo Wotu memiliki SDM yang semangat dalam bekerja dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Indikator Pelayanan Minimal IGD bahwa waktu tanggap darurat adalah 4 menit dan tingkat kepuasan pasien 78% versi Kepala Instalasi, yang artinya itu sudah sesuai standar. Adanya pertemuan rutin antara pemangku kebijakan rumah sakit dengan pemerintah sehingga dalam forum tersebut rumah sakit dapat menyampaikan usulan-usulan langsung kepada Pemerintah. Hal ini merupakan bentuk komunikasi yang baik antara manajemen rumah sakit dengan pemerintah selaku pemilik rumah sakit (Indriono, 2020).

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara sumber daya manusia dan standar pelayanan minimal di ruang instalasi gawat darurat RSUD I Lagaligo Wotu.

SDM yang ada di instalasi gawat darurat RSUD I Lagaligo Wotu sudah terpenuhi yaitu dokter spesialis ada, dokter umum, perawat dengan pendidikan S1 Ners dan DIII dan SDM non medis seperti penunjang, administrasi dan keuangan juga memenuhi.

Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuzairi et al., (2017) di RSUD dr.H. Koesnadi Bondowoso, bahwa terdapat kekurangan SDM yang terlatih, yang disebabkan oleh kurangnya anggaran dana untuk pelatihan dan terbatasnya kuota peserta pelatihan oleh penyelenggara pelatihan. Mekanisme implementasi SPM di rumah sakit bertujuan untuk memberikan pemaknaan terhadap standarisasi kualitas/mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik, pada aspek lainnya juga diharapkan dapat membentuk tenaga medis, perawat, bidan, tenaga profesi lainnya ataupun tenaga

administrasi yang memiliki kepribadian, keterampilan, dan keahlian serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan kesehatan nasional (Ridwan, 2017).

Dari hasil wawancara yang dilakukan hampir semua informan mengatakan bahwa rata rata semua petugas di IGD RSUD I Lagaligo Wotu memiliki sertifikat kegawatdaruratan yang masih berlaku. Dalam PMK 129 tahun 2008 mensyaratkan bahwa semua pemberi pelayanan kegawatdaruratan harus memiliki sertifikat kegawatdaruratan yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS). mereka langsung aplikasikan di ruangan instalasi rawat darurat Berdasarkan telaah dokumen sudah 90% petugas IGD yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan. Dengan adanya sertifikat tersebut menandakan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan, kemampuan yang didapat petugas dari pelatihan langsung dapat dipraktekkan dengan baik karna didukung oleh semangat ataupun lingkungan yang ada.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lontoh et al., 2013) tentang pengaruh pelatihan teori bantuan hidup dasar terhadap pengetahuan resusitasi jantung paru menyatakan bahwa adanya hubungan antara pelatihan dengan pengetahuan.

Menurut Ringu, (2017) menyatakan bahwa semakin kompeten seseorang pegawai maka semakin tinggi pula kinerja pegawai tersebut. Untuk meningkatkan keterampilan maka perlu dilakukan pelatihan yang merupakan salah satu faktor yang di butuhkan untuk memperbaiki kualitas pegawai. Sehingga sumber daya manusia dapat berkontribusi untuk meningkatkan mutu rumah sakit terkhusus instalasi gawat darurat sehingga tercapai tujuan organisasi.

KESIMPULAN

Sarana prasarana dengan Implementasi Standar Pelayanan Minimal di IGD RSUD

I Lagaligo Wotu mempunyai hubungan yang bermakna.

Sumber Daya Manusia dengan Implementasi Standar Pelayanan Minimal di IGD RSUD I Lagaligo Wotu mempunyai hubungan yang bermakna.

SARAN

Untuk Rumah Sakit dan stafnya agar tetap melaksanakan Standar Pelayanan Minimal terkhusus IGD agar mutu rumah sakit bisa berjalan optimal Sesuai dengan standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, B. (2016). Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 82. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.91>
- Astuti, S. W., Arso, S. P., & Fatmasari, E. Y. (2017). Analisis Proses Perencanaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Instalasi Gawat Darurat Di Rsud Dr. R. Soetijono Blora. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(4), 137–144.
- Bangsawan, A. K., Rumayar, A. A., & Tucunan, A. A. T. (2016). Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Spm) untuk Pelayanan Bayi di Puskesmas Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 741, 1–10.
- Hendarwanl, H., & Oster, R. (2015). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota Analysis of Health Minimum Services Standards Implementation in District / City. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 14(4), 367–380.
- Indriono, A. (2020). Implementasi Standar Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Minimal Kesehatan di

- Kota Pekalongan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(1), 72–81. <https://doi.org/10.31941/pj.v19i1.1136>
- J.E.Tomboku, J., G.D., K., & A., R. (2018). Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Di Ruang Rawat Inap Rsud Dr Sam Ratulangi Tondano. *Medicine Journal*.
- Kuzairi, U., Yuswadi, H., Budiharjo, A., & Patriadi, H. B. (2017). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Pelayanan Publik Bidang Pelayanan Kesehatan (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI BONDOWOSO). *Politico*, 17(2), 184–205. <http://jurnal.unmuhsember.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/881>
- Lontoh, C., Kiling, M., & Wongkar, D. (2013). Pengaruh Pelatihan Teori Bantuan Hidup Dasar Terhadap Pengetahuan Resusitasi Jantung Paru Siswa-Siswi Sma Negeri 1 Toili. *Jurnal Keperawatan UNSRAT*, 1(1), 111914.
- Ridwan, B. (2017). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Di Rsud Undata Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 5(12), 108–117.
- Ringu, Y. T. (2017). ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RESPONSE TIME PERAWAT DI IGD RSU TIPE C DI KUPANG BERDASARKAN TEORI KINERJA GIBSON. In *Educational Psychology Journal*. <https://doi.org/DOI:>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Supriyanto, Harianti, & Lestari. (2014). Analisa Faktor-faktor Penyebab Tidak Lengkapnya Laporan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 28(1), 36–40.
- Trisnantoro, L. (2018). *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit*. UGM Press.
- Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Vermasari, A., Masrul, M., & Yetti, H. (2019). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Di Instalasi Gawat Darurat (Igd) Rsu Mayjen Ha Thalib Kabupaten Kerinci. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(2), 275-284.
- Wawan P, Arya (2016). *Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Gmim Kalooran Amurang I*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Manado: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas SamRatulangi.